
Mewujudkan Generasi Melek Politik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045

Daud Yefkanius Nassa

Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: daud.nassa@staf.undana.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diserahkan 13 Juni 2024

Direvisi 10 November 2024

Disetujui 25 November 2024

Keywords:

Civic Education,

Political Participation,

Young Citizen

Abstract

This study aims to analyze the role of civic education in enhancing political participation and active engagement among young citizens.

The research employs a qualitative approach, utilizing literature review and document analysis methods. Data collection techniques involve reviewing academic articles, policy reports, and existing civic education program documents. Research instruments include document analysis sheets to evaluate curriculum content, teaching materials, and instructional methods. The data were analyzed using thematic analysis to identify patterns and relationships relevant to youth political awareness.

The findings indicate that civic education has a positive impact on increasing political awareness among youth. Interactive and contextual programs, such as simulations, discussions, and participation in local and national political activities, have proven more effective in improving political literacy. However, the study also highlights challenges, including limited resources and curricula that are less aligned with current socio-political realities. Recommendations include curriculum improvements, educator training, and increased access to educational resources. These efforts require collaboration between educational institutions, the government, and the community to ensure that civic education can adequately prepare the younger generation to face future challenges and contribute positively to Indonesia's Golden Era.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan aktif pemuda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan data melibatkan kajian literatur dari artikel ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen program pendidikan kewarganegaraan yang ada. Instrumen penelitian mencakup lembar analisis dokumen untuk mengevaluasi isi kurikulum, materi ajar, serta metode pengajaran. Data dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan hubungan yang relevan dengan kesadaran politik pemuda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran politik pemuda. Program yang interaktif dan kontekstual, seperti simulasi, diskusi, serta partisipasi dalam kegiatan politik lokal dan nasional, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan literasi politik. Namun, penelitian juga mengidentifikasi kendala, termasuk kurangnya sumber daya dan kurikulum yang kurang relevan dengan realitas sosial-politik. Rekomendasi meliputi perbaikan kurikulum, pelatihan pendidik, dan peningkatan akses sumber daya pendidikan. Upaya ini memerlukan kerjasama antara institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan pendidikan kewarganegaraan dapat mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di masa depan dan berkontribusi dalam menyongsong Indonesia Emas.

© 2024 Universitas Muria Kudus

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi, menegaskan bahwa partisipasi politik warganegara berasal dari pemahaman bahwa kedaulatan negara bersumber dari rakyat. Konstitusi, khususnya Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang telah diamandemen, menegaskan bahwa "Kedaulatan Negara berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar." Oleh karena itu, setiap kebijakan politik harus merangkul kehendak rakyat untuk mencerminkan kepentingan masyarakat. Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat diwujudkan dengan melibatkan warga negara Indonesia dalam menentukan arah kebijakan politik. Namun, meskipun Indonesia menetapkan fondasi demokratis ini, partisipasi politik generasi muda masih rendah, terutama dalam merumuskan kebijakan dan kontribusi pada kegiatan politik.

Poerwadarminta menyatakan bahwa "Generasi" adalah periode waktu ketika orang menjalani kehidupan, sementara "Muda" adalah tahap sebelum setengah dari usia hidup. *Meanwhile, the young generation is an identity with great potential for a nation* (Irawan, Wijayanti, & Hermawan 2021). Fenomena rendahnya partisipasi politik generasi muda bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti frekuensi rendah dalam pertemuan rapat politik. Partisipasi politik, menurut Alodat et al. (2023), mencakup berbagai bentuk keterlibatan seperti memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, menghadiri pertemuan politik, dan menghubungi pejabat publik untuk menyampaikan aspirasi.

Meskipun konstitusi mengamanatkan kedaulatan rakyat, penelitian ini akan mengeksplorasi ketidaksesuaian antara prinsip demokrasi dan rendahnya partisipasi politik generasi muda di Indonesia. Partisipasi politik dalam negara demokrasi penting sebagai indikator kualitas demokrasi, melibatkan individu atau kelompok dalam pemilihan dan pengaruh kebijakan. Pendidikan politik bagi generasi muda diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah untuk memastikan bahwa generasi muda dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik (Hussain et al., 2024; Kerr & Hoskins, 2023; Ribeiro et al., 2023). Model efektif adalah yang dijalankan "oleh anak muda, untuk anak muda" dengan pendekatan "*learning by doing*". Meskipun demikian, pendidikan politik belum sepenuhnya menyentuh generasi muda,

yang masih sering diperlakukan sebagai objek politik. Hal ini menyebabkan apatisme politik dan keterlibatan anak muda yang lebih dipengaruhi oleh faktor politik kekerabatan daripada kesadaran politik yang sebenarnya (Haryanto, 2020)

Partisipasi aktif dan kesadaran generasi muda dalam keterlibatan politik nasional memegang peranan penting, karena menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keberlangsungan sistem politik suatu negara. Untuk mendukung hal tersebut, pendidikan politik bagi generasi milenial perlu disesuaikan dengan karakteristik mereka dalam memahami dan merespons isu-isu politik (LaCombe & Juelich, 2019). Selanjutnya, tujuan dari pendidikan politik bagi generasi muda dijabarkan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan politik adalah memberikan panduan kepada generasi muda Indonesia untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menciptakan generasi muda Indonesia yang memiliki kesadaran akan kehidupan berbangsa dan bernegara, berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk membentuk manusia Indonesia secara menyeluruh.

Keterlibatan pemuda merujuk pada partisipasi mereka dalam berbagai aspek politik, baik secara langsung dalam proses pemerintahan maupun dalam pemilihan umum. Pada konteks pemilu, keterlibatan ini mencakup peran sebagai pemilih yang berkualitas, yaitu individu yang siap dan sadar dalam menjalankan hak pilihnya (Rizal, 2022). Namun kenyataannya, masyarakat Indonesia masih tepapar isu hoax dalam pemilihan umum yang mempengaruhi kualitas mereka sebagai pemilih dalam pemilihan umum (Febriansyah & Patra, 2023). Hal ini dipertegas oleh Hasil survei dari Katadata Insight Center (KIC) yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta SiBerkreasi menunjukkan bahwa sekitar 30% hingga hampir 60% penduduk Indonesia terpapar hoaks saat beraktivitas online, sementara hanya 21% hingga 36% yang mampu mengenali kebenaran informasi. Hoaks yang ditemukan banyak berkaitan dengan isu politik, kesehatan, dan agama. Direktur Riset Katadata Insight Center, Mulya Amri, menyatakan bahwa, selain kemampuan mengenali hoaks yang masih rendah, tingkat literasi digital di Indonesia juga belum

mencapai level "baik." Survei ini mengukur literasi digital melalui 7 pilar dan 4 sub-indeks, menunjukkan bahwa indeks literasi digital nasional baru mencapai 3,47, sedikit di atas level menengah. Temuan ini memberikan indikasi bahwa peningkatan literasi digital di seluruh wilayah Indonesia menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan hoaks dan meningkatkan pemahaman informasi di dunia maya (Amaly & Armiah 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang melek politik, sehingga mampu aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi dan berkontribusi secara positif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Pelaksanaan pembelajaran PKn dipengaruhi oleh pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang telah dipilih dan disusun, bersama dengan filosofi dan komitmen guru, serta persepsi dan sikap mereka terhadap siswa atau mahasiswa, sebagai pelaku warganegara muda untuk menjalankan pembelajaran politik yang telah direncanakan.

Strategi pembelajaran adalah bagian integral dari proses perencanaan. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberi pengalaman belajar kepada peserta didik (Widhiasti et al., 2022). Strategi ini terdiri atas teknik, prosedur, dan metode yang membawa siswa pada pencapaian tujuan. Pentingnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk Generasi Muda *Smart And Good Citizenship* menjadi krusial untuk mengembangkan sikap kewarganegaraan yang diinginkan oleh negara. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui proses pembelajaran, terutama dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Tujuan dari upaya ini adalah untuk menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan demokrasi. Jones (2015) menyatakan bahwa keberhasilan dalam pembelajaran sangat bergantung pada efektivitas perencanaan dan kemampuan untuk mengimplementasikan rencana tersebut ke dalam tindakan partisipatif nyata. Perencanaan dianggap sebagai kunci utama dalam pembelajaran yang dapat memastikan siswa belajar secara efektif, menarik, bervariasi, dan progresif. Dengan merancang perencanaan yang baik, guru dapat mengidentifikasi cara siswa belajar dan membuat kemajuan. Setelahnya, guru dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran

dengan merujuk pada persiapan yang telah mereka rancang sebelumnya.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bentuk pendidikan politik yang mengintegrasikan segala dasar dan teori politik, menyelaraskan pemahaman konsep-konsep politik dalam konteks pembelajaran kewarganegaraan (Ramdani et al., 2019). Namun meskipun penelitian seperti yang dilakukan oleh (Nurgiansah 2021; Rahman 2018; Ramdani et al. 2019) menyebutkan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam membentuk partisipasi politik pemuda di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut justru bertentangan dengan hasil penelitian (Susila et al. 2020); (Utami & Cramer 2020) dan (Parinduri 2019) yang menyebutkan pendidikan di Indonesia tidak mempengaruhi proses keterlibatan pemuda dalam politik di Indonesia. yang menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak memengaruhi keterlibatan pemuda dalam ranah politik. Kesenjangan antara temuan-temuan ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang efektivitas implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan pemuda dalam politik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi aktif pemuda. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi program pendidikan kewarganegaraan serta memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan perannya dalam mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi analisis teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang muncul dalam konteks sosial yang sedang diinvestigasi (Sugiyono 2015). Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk melakukan studi kepustakaan atau literatur dengan mengumpulkan referensi buku yang relevan terkait dengan pengelolaan dan penyimpanan surat.

Studi Pustaka digunakan untuk mengkaji semangat dan kontribusi warganegara muda dalam meningkatkan partisipasi politik melalui implementasi pendidikan kewarganegaraan. Fokus utama penelitian terletak pada identifikasi dampak positif pembelajaran kewarganegaraan terhadap pemahaman, sikap, dan aktivitas keterlibatan pemuda dalam ranah politik. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini akan mendalami

pada kerangka teoretis serta temuan-temuan terkini yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan peran pemuda dalam proses politik. Kesenjangan antara temuan-temuan ini akan menjadi fokus untuk menggali pertanyaan mendalam tentang efektivitas implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan pemuda dalam politik. Selain itu, penelitian ini akan memberikan implikasi kebijakan dan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan sebagai pendorong partisipasi aktif pemuda dalam mewujudkan tatanan demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Generasi Muda Aktif Dalam Partisipasi Politik**

Sebuah negara akan memiliki generasi muda yang cerdas dan memiliki kewarganegaraan yang baik jika mereka dibekali dengan pengetahuan dan pembelajaran yang sesuai. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. PKN merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang mampu berpikir, bertindak, bersikap, berkembang, dan berinteraksi secara cerdas, kritis, analitis, serta berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara (Supriyanto 2022). Generasi muda juga diharapkan memiliki kehidupan dunia yang didasari oleh nilai-nilai agama, budaya, hukum, ilmu pengetahuan, serta watak yang bersemangat, berdedikasi, dan mewujudkan sifat demokratis dalam negara hukum Indonesia yang religius, adil, beradab, dan bersatu, dengan masyarakat yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Generasi muda memainkan peran krusial dalam mengembangkan masyarakat demokratis melalui keterlibatan aktif dalam partisipasi politik. Mereka membawa gagasan segar, energi, dan pandangan baru yang penting untuk inovasi dan perubahan. Partisipasi politik generasi muda dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti memilih dalam pemilu, terlibat dalam kampanye politik, atau bahkan menjadi anggota partai politik (Barsukova et al., 2021; Sloam, 2018). Melalui tindakan-tindakan ini, generasi muda dapat memengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan isu-isu yang mereka pedulikan. Selain itu, keterlibatan dalam partisipasi politik juga dapat membantu generasi muda memahami pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial, yang semuanya

merupakan pondasi masyarakat demokratis yang kuat. Selajalan dengan hal tersebut, (Fahrezi et al., 2023) menyebutkan pendidikan yang bermutu akan membekali mereka dengan pemahaman yang lebih baik terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negaranya, serta memberikan pondasi yang kuat untuk berkontribusi secara efektif dalam pembangunan negara. Secara keseluruhan, generasi muda memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa. Melalui keterlibatan aktif dalam proses demokrasi, pengembangan diri yang terus-menerus, dan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan global, mereka memiliki peran vital dalam mendorong kemajuan.



Gambar 1. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
Sumber: Dokumentasi SMP Negeri Belitang Madang Raya, 2024

Gambar 1 menunjukkan implemetansi pendidikan kewarganegaraan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) dengan tema Demokrasi dalam mendukung partisipasi politik generasi muda adalah dengan memperkenalkan pemilihan umum langsung secara praktik seperti melalui pemilihan OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) di sekolah. Hal ini merupakan bagian penting dari proses demokratis dan dapat memberikan kontribusi pada pendidikan siswa dalam usaha memperkuat partisipasi politik generasin muda. Hal ini selaras dengan Zagidullin et al. (2021) partisipasi dalam pemilihan sekolah memainkan peran positif dalam mempersiapkan siswa menjadi pemilih dewasa yang berkualitas

Implementasi proyek untuk memperkuat profil siswa dalam Pancasila (P5) dengan tema demokrasi adalah inisiatif yang signifikan dalam konteks pendidikan Indonesia. Sebuah studi difokuskan pada pelaksanaan proyek P5 dengan tema demokrasi, yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan proyek sebagai bagian dari perencanaan pelaksanaan kurikulum mandiri. Studi ini menemukan bahwa proyek memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih budaya demokratis dalam lingkungan

kontekstual (Okayanti et al. 2023; Rachmawati et al. 2022; Ulfah et al. 2023). Kemudian, penelitian lain telah dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman demokrasi siswa melalui proses pemilihan ketua OSIS. Salah satu studi difokuskan pada pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di sebuah sekolah tertentu dan hubungannya dengan pemahaman siswa tentang demokrasi (Insan & Nurdin 2020).

Studi lain membahas pengembangan literasi demokrasi dalam pemilihan pemimpin melalui proses pembelajaran, menekankan peran sekolah dalam mempromosikan praktik demokratis yang baik (Istiara et al. 2021). Selain itu, penelitian telah dilakukan untuk menguji hubungan antara Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai pendidikan demokrasi dan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah, termasuk pemilihan ketua OSIS (Soetrisnaadisendjaja et al. 2019). Selanjutnya, sebuah studi menganalisis implementasi sistem e-voting untuk pemilihan ketua OSIS, menyoroti penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses demokratis di sekolah (Ikhwan 2018). Studi-studi ini secara bersama-sama menekankan pentingnya pendidikan demokrasi dan partisipasi siswa dalam pemilihan ketua OSIS sebagai sarana untuk mempromosikan nilai dan praktik demokratis di sekolah yang akhirnya mendukung keterlibatan politik generasi muda kedepannya.

Pembelajaran PKN adalah memberikan bekal pengetahuan, membina sikap perilaku, dan melatih keterampilan agar mereka menjadi warga negara demokratis, taat hukum, dan taat asas dalam kehidupan masyarakat madani. Pendidikan karakter bagi generasi muda, terutama pemuda saat ini, menjadi sangat krusial karena mereka adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu terus-menerus dilakukan oleh semua pihak untuk memenuhi harapan dan memastikan masa depan yang baik bagi bangsa Indonesia. Generasi muda di Indonesia yang aktif sebagai warga negara dalam partisipasi politik mengalami perkembangan seiring dengan demokratisasi yang berlangsung sejak akhir 1990-an (Mujani et al. 2019).

Tujuan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) oleh negara adalah agar semua warga negara dapat menjadi individu yang berkualitas (*to be good citizens*). Individu yang memiliki kecerdasan kewarganegaraan, mencakup kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab kewarganegaraan (*Civic Responsibility*); serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah

air (Maftuh & Sapriya 2005). Adapun, penilaian dalam mata pelajaran PKN, yang mencakup penilaian sikap sosial dan spiritual, penilaian pengetahuan, serta penilaian kinerja atau keterampilan, dapat merangsang pembentukan kepribadian dan sikap warganegara muda sesuai dengan harapan dan tujuan PKN, yaitu menjadi warga negara yang baik, memiliki kepribadian dan moral yang baik, bersikap demokratis, dan bertanggung jawab, terutama bagi generasi muda.

Pendidikan Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membentuk generasi muda yang aktif sebagai warga negara dalam partisipasi politik. Studi tentang perilaku pemilih di Indonesia menunjukkan bahwa pemahaman tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi politik dapat ditingkatkan melalui pendidikan kewarganegaraan (Mujani et al. 2019). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan yang memperkuat pemahaman akan isu-isu politik dan demokrasi dapat membantu generasi muda mempersiapkan diri untuk terlibat secara aktif dalam partisipasi politik.

Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik Warga Negara Muda

Pendidikan politik merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang maupun lebih yang dilakukan dengan sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik dapat membentuk insan-insan yang melek politik, artinya insan yang mampu menerima informasi mengenai proses penyelenggaraan negara, pembuatan keputusan, serta memahami keterampilan politik dalam menumbuhkan nilai moral yang fundamental dalam berdemokrasi. Penyelenggaraan pendidikan politik harus dapat meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, kemampuan bangsa, pengembangan pribadi itu. Pendidikan politik harus mampu membangkitkan kesadaran rakyat untuk mengenal permasalahan politik yang belum terpecahkan (Chen & Madni, 2024). Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik pada umumnya berupa kegiatan kampanye dan kaderisasi (Bashori 2018; Nurdin 2019; & Pasaribu, 2017).

Pendidikan politik memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokratis. Menurut Wasburn & Covert (2017) sosialisasi politik dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, dalam kelompok sosial dan media. Pendidikan politik masyarakat adalah

merupakan rangkaian usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, selama ini mengalami gelombang pasang surut yang luar biasa. Pendidikan politik juga merupakan bagian proses pembaharuan kehidupan politik bangsa Indonesia yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, dinamis dan efisien. Pendidikan politik dalam pengertian luas, yaitu sosialisasi politik, berlangsung secara alami sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Sosialisasi politik dipahami sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat melalui berbagai agen seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, dan media massa (Koskimaa & Rapeli, 2015). Jadi, pendidikan politik dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.

Hasil penghayatan itu akan menghasilkan melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal. Perluasan dan perannya saat ini sebagai acuan utama penilaian fenomena dan proses dapat dilihat di media, berbagai cabang ekonomi, politik, pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, seni, teknologi baru, dan lain-lain (Choat dkk. 2023; Koczanowicz & Włodarczyk 2023; Stefanelli dkk. 2023; Zhixiang 1989) Pendidikan, kelas sosial subjektif, kepercayaan institusional, dan ketidakberdayaan berdampak pada kepatuhan individu terhadap sistem kepercayaan yang berbeda (Davies & Hogarth 2004). Berdasarkan hal tersebut, pendidikan politik merupakan usaha untuk mengarahkan proses pendidikan politik masyarakat pada tatanan sistem politik yang ideal. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, sistem politik yang diinginkan adalah Demokrasi Pancasila (Pasaribu, 2017; Rahman, 2018). Menurut Pasal 31 Undang-Undang No.2 Tahun 2008, tujuan pendidikan politik antara lain tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2. Tujuan Pendidikan Politik
Sumber: Pasal 31 Undang-Undang Tahun 2008
Gambar 2 merupakan tujuan Pendidikan politik meningkatkan kesadaran hak dan

kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hasil penghayatan tersebut akan menghasilkan atau melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal. Perluasan dan perannya saat ini sebagai acuan utama penilaian fenomena dan proses dapat dilihat di media, berbagai cabang ekonomi, politik, pendidikan, agama, ilmu pengetahuan, seni, teknologi baru, dan lain-lain (Choat dkk. 2023; Koczanowicz & Włodarczyk 2023; Stefanelli dkk. 2023; Zhixiang 1989) Pendidikan, kelas sosial subjektif, kepercayaan institusional, dan ketidakberdayaan berdampak pada kepatuhan individu terhadap sistem kepercayaan yang berbeda (Davies & Hogarth 2004).

Pendidikan politik berperan sebagai langkah pencegahan yang efektif dalam membangkitkan kesadaran, keterlibatan, dan partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi milenial. Generasi milenial seharusnya menjadi individu yang cerdas, memungkinkan mereka menjadi subjek yang kritis dan bukan hanya objek dalam panggung politik nasional. Harapannya, generasi milenial dapat memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Pendidikan politik yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang mampu bekerja sama untuk membentuk tatanan kehidupan yang demokratis, di mana setiap warga negara memahami hak dan tanggung jawab mereka dengan baik. Salah satu fungsi input dalam sistem politik adalah sosialisasi politik, yang berlaku di berbagai negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Proses sosialisasi politik dipimpin oleh agen atau aktor politik tertentu. Menurut Koskimaa & Rapeli (2015) mengidentifikasi empat agen utama dalam proses sosialisasi, yaitu keluarga, kelompok teman sebaya, media massa, dan lembaga sekolah. Pada tahap usia remaja, teman sebaya memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku individu.

Pentingnya pendidikan politik telah menjadi fokus utama pemerintah, sebagaimana tercermin dalam keberlakuan undang-undang yang mendorong pelaksanaan upaya pendidikan politik bagi masyarakat. UU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik, terutama pasal 31, menegaskan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik, dengan tujuan

meningkatkan: (1) kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya; (2) partisipasi politik dan inisiatif masyarakat; (3) kemandirian, kedewasaan, dan membangun rasa solidaritas masyarakat dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 pasal 10 ayat 1-2 dan Inpres Nomor 12 Tahun 1982 juga menyoroti urgensi pendidikan politik bagi generasi muda. Maksud dari pendidikan politik adalah memberikan arahan untuk mengembangkan kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi muda Indonesia. Keberhasilan pendidikan politik dapat dicapai secara optimal dengan dukungan partisipatif dari lembaga keluarga, masyarakat, dan media massa (Wanma 2021).

Pendidikan politik merujuk pada upaya sistematis untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman terkait proses politik, pemerintahan, dan partisipasi dalam sistem politik suatu negara. Ini bertujuan untuk membekali warganegara muda dengan pemahaman yang kokoh tentang bagaimana politik berfungsi, hak dan tanggung jawab kewarganegaraan, serta nilai-nilai demokrasi (Wardhani, 2018). Selanjutnya partisipasi politik suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan aktif individu dalam proses politik suatu negara. Ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari memberikan suara dalam pemilihan umum, mengikuti kampanye politik, hingga terlibat dalam organisasi atau aksi politik. Pendidikan politik berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik dengan memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan bagi warganegara muda untuk terlibat secara efektif dalam kehidupan politik. Pemahaman politik mencakup kemampuan untuk memahami isu-isu politik, analisis kebijakan, dan dinamika politik dalam skala lokal, nasional, dan internasional. Pendidikan politik memberikan landasan untuk pemahaman politik yang baik, membantu warganegara muda mengenali berbagai isu penting, serta memahami implikasi kebijakan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan politik, partisipasi politik, dan pemahaman politik adalah elemen-elemen penting bagi warganegara muda. Membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan politik akan membantu menciptakan generasi yang terinformasi, aktif, dan berkontribusi dalam

membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan (Liano, 2017 & Ngozwana 2017).

Membentuk Warga Negara Demokratis Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2025

Fokus utama pembangunan negara terletak pada upaya mengembangkan generasi muda menjadi warga negara yang baik, dan hal ini merupakan prioritas yang tidak terbantahkan. Tidak ada tugas yang lebih krusial daripada membentuk warga negara yang bertanggung jawab, efektif, dan terdidik. Pernyataan ini sangat relevan dengan kondisi nyata dan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini. Oleh karena itu, generasi muda perlu mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan dalam hal sikap dan kepribadian, guna membentuk karakter yang demokratis, bertanggung jawab, dan toleran. Pembentukan karakter ini juga harus diiringi dengan penguatan sikap serta perilaku kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konteks substansi materi keilmuan pendidikan kewarganegaraan tentu pada umumnya mengarah pada kajian ideologi pancasila, bela negara, sosial dan politik, nilai-nilai moral, kemultikulturalan, hukum dan demokrasi, konstitusi dan ketatanegaraan, hubungan internasional, hak azasi manusia dan kebebasan pers, kebudayaan dan kearifan lokal, pertahanan dan keamanan nasional serta substansi materi lainnya yang relevan dengan tujuan serta kajian pendidikan kewarganegaraan (Nanggala 2020). Pandangan lain mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mengingatkan warga negara akan pentingnya nilai, hak dan kewajiban, agar segala sesuatu yang dilakukan sejalan dengan tujuan dan cita-cita negara serta menyimpang dari harapan.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus bagi pemilih pemula dan masyarakat secara umum. Materi-materi yang berkaitan dengan politik secara eksplisit terdapat pada materi pelajaran di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI (sebelas), yaitu pada BAB pembahasan Budaya Politik. Bab ini menjelaskan tentang pengertian budaya politik, budaya politik, tipe-tipe budaya politik dan lain sebagainya. Sehingga harapannya, peserta didik selesai menempuh materi ini, peserta didik diharapkan mampu untuk mendeskripsikan pengertian budaya politik, menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, mendeskripsikan pentingnya

sosialisasi pengembangan budaya politik, serta mampu menampilkan peran serta budaya politik partisipan. Begitu juga pendidikan politik yang dapat kita berikan kepada masyarakat sekitar pada umumnya, yaitu dengan cara berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti ikut rapat RT, ikut kegiatan ronda, ikut serta dalam pemilihannya.

Proses pembelajaran dapat melibatkan berbagai jenis pembelajaran seperti pembelajaran kognitif, motorik, dan afektif, yang semuanya berkontribusi terhadap perubahan perilaku. Pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur yang merupakan hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan (Kidd, 2014; Tomporowski et al., 2017). Dalam konteks ini, perubahan perilaku juga mencakup pembelajaran tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang membahas ke-Indonesiaan, membentuk identitas ke-Indonesiaan, membangun kesadaran kebangsaan, dan mengasah rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional, sebagai anggota masyarakat Indonesia yang terdidik, perlu memahami esensi Indonesia, memiliki karakter ke-Indonesiaan, merasakan kebangsaan, dan mencintai Indonesia. Individu semacam ini dianggap sebagai warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam dinamika kehidupan bersama, kebangsaan, dan negara yang berprinsip pada demokrasi.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sistem nilai individu, terkait dengan ekspresi gerak dan martabat sebagai manusia sesuai dengan norma kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pendidikan Kewarganegaraan selalu mengarahkan upaya peningkatan kesadaran dan martabat individu, baik dalam aspek personal maupun sebagai bagian dari komunitas suatu negara. Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan terorganisir untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri, termasuk kekuatan spiritual, kendali diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara (UU RI No. 20 Tahun 2003). Dalam konteks ini, pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter, salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). PKn telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan kehidupan bangsa Indonesia. PKn bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung

jawab. PKn bertujuan menciptakan generasi berkarakter dan penuh rasa nasionalisme.

Pendidikan Kewarganegaraan, yang juga dikenal sebagai "*citizenship education*" atau "*civic education*," memiliki perbedaan antara keduanya. "*Citizenship education*" adalah bentuk pendidikan untuk membentuk karakter warga negara, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara dan lembaga seperti keluarga, sekolah, komunitas, media, dan lain-lain. Sementara itu, "*civic education*" adalah pendidikan pembentukan karakter warga negara yang terutama dilaksanakan melalui sekolah. Menurut Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dijalankan oleh lembaga pendidikan, di mana seseorang belajar tentang orientasi, sikap, dan perilaku politik. Hal ini bertujuan agar individu tersebut memiliki pengetahuan politik (*political knowledge*) dalam memahami pengaruh politik, partisipasi politik (*political participation*), dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara rasional.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat dianggap setara dengan Pendidikan Demokrasi karena bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat agar mampu berpikir kritis dan bertindak demokratis (Zamroni dalam Budiutomo et al., 2021). Hal ini dilakukan melalui upaya menanamkan kesadaran demokrasi sebagai bentuk kehidupan masyarakat yang memberikan jaminan terhadap hak-hak warganya. Sedangkan menurut Soemantri menyajikan karakteristik terkait PKn, yaitu: 1) PKn menjadi bagian dari seluruh program pendidikan di sekolah; 2) PKn mencakup berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat memupuk perilaku dan kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat yang demokratis; dan 3) dalam lingkup PKn, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan pengalaman, kepentingan masyarakat, pribadi, serta persyaratan objektif untuk kehidupan bernegara. Pentingnya nilai-nilai dalam pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anggota sekolah, mencakup aspek pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan pola tindakan untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Penanaman nilai karakter sebaiknya dilakukan sejak dini karena hal ini membentuk kebiasaan dalam menerapkan nilai-nilai karakter tanpa disadari, yang akan secara perlahan membentuk karakter baik peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Hal ini menjadi relevan mengingat generasi muda rentan terhadap pengaruh globalisasi yang dapat membawa mereka menjauh dari identitas bangsa Indonesia dan hidup dalam apatis (Rahmatiani 2017). Sedangkan, menurut Ramadhan et al. (2024)

tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan mencakup hal-hal berikut: (1) Membentuk keterampilan partisipatif yang berkualitas dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan politik dan sosial, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. (2) Menjadi anggota masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan serta integrasi bangsa, dengan tujuan menciptakan Indonesia yang tangguh, sejahtera, dan demokratis. (3) Menghasilkan warganegara muda yang memiliki pemikiran komprehensif, analitis, kritis, dan bersikap demokratis. (4) Mengembangkan budaya demokrasi, termasuk nilai-nilai kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam kegiatan politik dan masyarakat. (5) Membentuk warganegara muda menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab melalui penanaman moral dan keterampilan sosial. Dengan demikian, mereka dapat memahami dan mengatasi berbagai isu kewarganegaraan aktual seperti toleransi, menghargai perbedaan pendapat, bersikap empati, menghargai pluralitas, memiliki kesadaran hukum dan keteraturan sosial, menghormati hak asasi manusia, mengembangkan demokrasi di berbagai bidang kehidupan, dan menghargai kearifan lokal (*local wisdom*).

Kepribadian warga negara tercermin melalui kebijakan kewarganegaraan, yang melibatkan pengembangan aspek-aspek kewarganegaraan, yaitu: pemahaman atau pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan kewarganegaraan (*civic commitment*), dan kepercayaan diri kewarganegaraan (*civic confidence*). Secara umum, pengembangan kebijakan kewarganegaraan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap individu agar dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kehidupan kewarganegaraan (Sari, Ismaya & Ahsin 2022).

Konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat vital dalam mempersiapkan warga negara agar memiliki komitmen yang kuat dan konsisten dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKn memberikan kontribusi terhadap tanggung jawab pendidikan yang berfokus pada pembentukan identitas dari berbagai bidang, seperti agama, sosio-kultural, suku bangsa, dan bahasa, untuk menciptakan warga negara yang cerdas, terampil, dan berakhlak yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam proses pembelajarannya sebaiknya dianggap dan diperlakukan sebagai implementasi praktik demokrasi. Pendekatan yang disarankan untuk pembelajaran ini adalah menggunakan metode yang lebih mengutamakan proses berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. Selain itu, dalam konteks yang sama, lingkungan sekolah dan masyarakat umumnya harus diatur sedemikian rupa sehingga menjadi suatu tempat untuk praktik "*spiral global classroom*" (Cogan dalam Hariyanto, 2021).

Dalam upaya membentuk partisipasi generasi muda, perlu diakui bahwa pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga melibatkan kesadaran dan kontribusi dari berbagai pihak, termasuk orang tua, anggota keluarga, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga pendidikan, orang tua, dan lingkungan masyarakat menjadi sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pembentukan karakter yang baik pada generasi muda.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Budimansyah (dalam Sulistyarni, 2015) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat diartikan sebagai kontribusi pendidikan terhadap pengembangan karakteristik yang menandai status sebagai warga negara. Terdapat tiga peran PKn menurut Budimansyah. *Pertama*, berdasarkan pendekatan psikopedagogi, PKn berperan sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal dan nonformal, yang bertujuan sebagai instrumen untuk meningkatkan dan memberdayakan anak dan pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warga negara yang baik dan cerdas. *Kedua*, berdasarkan pendekatan sosio-kultural, PKn berperan sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang mengaktualisasikan diri warga negara, baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif yang cerdas dan bertanggung jawab. *Ketiga*, berdasarkan pendekatan intervensi sosio-politik, PKn berperan sebagai program pendidikan politik kebangsaan untuk para penyelenggara negara, anggota, dan pimpinan organisasi sosial dan politik, yang dikemas dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan disposisi

kewarganegaraan (Suprpto & Handoyo 2021; Chabiba, Ismaya & Wiranti 2022).

Selanjutnya, generasi emas adalah generasi yang memiliki nilai-nilai budi pekerti yang luhur serta dipandang sebagaigenerasi yang berwatak religius dan sarat dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi generasi emas yang diharapkan adalah pribadi yang mengamalkan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam Pancasila dan agama yang dianutnya dan mampu menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi sikap yang utuh dalam kesehariannya.

Generasi Indonesia emas 2045 merupakan generasi 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Melihat dari bonus demografi, generasi ini harus diisi oleh generasi muda yang memiliki wawasan luas, jiwa kreatif dan berbudi luhur. Oleh karenanya, pendidikan merupakan sarana penting untuk mempersiapkan generasi emas ini, terutama dalam hal karakternya. Karakter yang dibangun haruslah bersifat holistik dan komprehensif dan berakar pada nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa. Penanaman karakter ini penting karena pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga nilai-nilai khususnya nilai nilai demokrasi (Mukri 2018; Prasarti & Prakoso 2020) Arah dari generasi emas 2045 ini adalah membawa negara Indonesia menjadi negera yang lebih maju (Sabiq, 2022).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peran krusial dalam membentuk warga negara yang demokratis dan berkomitmen terhadap cita-cita Indonesia Emas 2045. PKn tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengetahuan mengenai sistem pemerintahan dan hukum negara, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan. Melalui PKn, generasi muda Indonesia diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai demokrasi, seperti rasa tanggung jawab, keadilan, toleransi, dan kerjasama, yang menjadi dasar bagi terbentuknya masyarakat yang inklusif dan harmonis. Dalam konteks Indonesia Emas 2045, PKn menjadi instrumen kunci dalam menciptakan warga negara yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip demokrasi.

Melalui pembelajaran PKn, siswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun negara. Penekanan pada penguatan karakter dan sikap kritis juga menjadi bagian integral dari PKn, mengajarkan generasi muda untuk berpikir rasional, kritis, dan berkontribusi positif dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, PKn membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan moral yang tinggi. Pentingnya PKn dalam membentuk warga negara demokratis terletak pada kontribusinya terhadap pembentukan kepribadian, kepedulian sosial, dan kapasitas partisipatif warga negara. Melalui pendidikan ini, diharapkan bahwa masyarakat akan tumbuh menjadi individu yang memiliki rasa kebangsaan dan tanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Dengan memiliki warga negara yang demokratis, Indonesia dapat lebih efektif mengatasi berbagai tantangan dan meraih keberlanjutan dalam segala aspek pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, peran PKn dalam pembentukan karakter dan kewarganegaraan yang kokoh menjadi landasan utama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dari berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memainkan peran vital dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman dan kesadaran politik yang tinggi, khususnya dalam persiapan menyongsong Indonesia Emas. Temuan ini juga menunjukkan bahwa dengan fokus pada transfer pengetahuan, pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan, pendidikan ini berhasil memberikan dampak positif dalam mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa. Peran pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan generasi muda yang cerdas dan berkarakter baik sangat penting, karena pembelajaran ini berkontribusi dalam membentuk sikap kewarganegaraan yang diharapkan bagi kemajuan bangsa. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa semangat warganegara muda dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan partisipasi politik melalui Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang memotivasi dan relevan dapat memicu semangat serta meningkatkan keterlibatan aktif generasi muda dalam kehidupan politik. Proses pembelajaran yang menginspirasi tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk sikap positif dan keterlibatan aktif dalam proses politik. Pentingnya semangat warganegara muda dalam konteks partisipasi politik menyoroti peran esensial pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini tidak hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk individu yang sadar akan hak dan

tanggung jawab mereka dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif. Dengan demikian, investasi dalam semangat warganegara muda melalui pendidikan kewarganegaraan dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam membentuk arah masa depan negara, sekaligus memberikan dampak jangka panjang bagi penguatan demokrasi dan pembangunan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alodat, M. T., Alma'aitah, M. A., & Alsoud, M. F. A. (2023). Youth Political Participation and Social Media Influence: A Comparative Study. *Social Sciences*, 12(7), 402. <https://doi.org/10.3390/socsci12070402>
- Amaly, N., & Armiah, A. (2021). Peran Kompetensi Literasi Digital Terhadap Konten Hoaks dalam Media Sosial. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), 43. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.6019>
- Barsukova, S. Y., Zvyagintsev, A. V, Laptieva, L. S., & Safiullina, E. I. (2021). Motives of Youth Participation in Election Campaigns. *Monitoring Obshchestvennogo Mneniya: Ekonomicheskije i Sotsial'nye Peremeny*, 4, 300–318. <https://doi.org/10.14515/MONITORING.2021.4.1841>
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287–310. <https://doi.org/10.32533/02207.2018>
- Budiotomo, T., Pertiwi, A. D., Nurfatimah, S. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi nilai pendidikan karakter dalam mata pelajaran PKn di sekolah dasar. *Basicedu*, 5(5). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1565>
- Chen, M., & Madni, G. R. (2024). Unveiling The Role of Political Education for Political Participation in China. *Heliyon*, 10(10), e31258. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31258>
- Choat, S., Wolf, C., & O'Neill, S. (2023). Decolonising economics and politics curricula in UK universities. *Studies in Higher Education*, 1–15. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2269215>
- Fahrezi, M. S., Aulia, P. A., & Santoso, G. (2023). Membela Tanah Air dengan Segenap Jiwa: Peran dan Tanggung Jawab Generasi Muda dalam Menjaga Kedaulatan dan Kepentingan Bangsa. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(2), 391–404. <https://doi.org/10.9000/jpt.v2i2.382>
- Febriansyah Putra, & Patra, H. (2023). Analisis Hoax pada Pemilu: Tinjauan dari Perspektif Pendidikan Politik. *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 95–102. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i1.119>
- Hariyanto, H. (2021). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk budaya demokrasi. *Jurnal P4I: Education and Civic Intelligence*, 5(1), 15–27. Retrieved from <https://www.jurnalp4i.com/index.php/learning/article/download/205/193>
- Haryanto, I. (2020). Politik Dinasti dan Partisipasi Politik Kaum Muda di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 1–15. <https://doi.org/10.22146/jsp.52467>
- Hussain, S., Knijnik, J., & Balram, R. (2024). Curriculum Wars and Youth Political Education in The UK and Australia—A Narrative Review. *Curriculum Perspectives*, 44(2), 193–203. <https://doi.org/10.1007/s41297-024-00226-1>
- Ikhwan, Y. (2018). Analisis dan Rancangan Sistem E-Voting Pemilihan Ketua OSIS. *Technologia: Jurnal Ilmiah*, 9(3), 138. <https://doi.org/10.31602/tji.v9i3.1382>
- Insan, K., & Nurdin, M. (2020). Pendidikan Demokrasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (Studi Pada Pemilihan Ketua OSIS Di SMA Negeri 1 Sinjai). *Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik*, 32–51. <https://doi.org/10.47030/jaq.v10i1.150>
- Irawan, H., Dwi Hermawan & Tutik Wijayanti (2021) Implementation of the Pendidikan Generasi Muda dan Kepramukaan (PGMK) for New Students as an Effort to Build the Spirit of State Defense Towards Advanced Indonesia. *Forum Ilmu Sosial* <https://doi.org/10.15294/fis.v48i2.32405>
- Istiar, F., Adijaya, N., & Ciciria, D. (2021). Pengembangan Literasi Demokrasi Dalam Pemilihan Pemimpin Melalui Proses Pembelajaran. *Educivilia: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 2(1), 63. <https://doi.org/10.30997/ejpm.v2i1.3165>
- Kerr, D., & Hoskins, B. (2023). The Evidence on Educational Methods for Political Engagement. *In Who's Afraid of Political*

- Education?: The Challenge to Teach Civic Competence and Democratic Participation* (pp. 147–162).
<https://doi.org/10.2307/jj.2711500.14>
- Khoirul Chabiba, M.I., Ismaya, E.A. & Wiranti, D.A. (2022). 'Penanaman Sikap Nasionalisme Melalui Mata Pelajaran IPS Kelas IV Sekolah Dasar', *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 21–28.
 doi:10.24176/wasis.v3i1.7446.
- Kidd, R. (2014). The Learning Transaction. In *Education for Adults: Volume 1: Adult Learning and Education* (pp. 71–87).
<https://doi.org/10.4324/9780203802670-16>
- Koczanowicz, L., & Włodarczyk, R. (2023). Everyday Life, Democracy and Education In The Age of Populism. *Ethics and Education*, 18(3–4), 299–315.
<https://doi.org/10.1080/17449642.2023.2282351>
- Koskimaa, V., & Rapeli, L. (2015). Political Socialization and Political Interest: The Role of School Reassessed. *Journal of Political Science Education*, 11(2), 141–156.
<https://doi.org/10.1080/15512169.2015.1016033>
- LaCombe, S. J., & Juelich, C. (2019). Salient Ballot Measures and The Millennial Vote. *Politics and Governance*, 7(2), 198–212.
<https://doi.org/10.17645/pag.v7i2.1885>
- Liano, S. M. (2017). The Counterfeit Presentment: an Early 20th Century Model of Intercollegiate Debate as Civic Education. *Argumentation and Advocacy*, 53(2), 90–102.
<https://doi.org/10.1080/00028533.2017.1304983>
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2019). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Mukri, S. G. (2018). Menyongsong Bonus Demografi Indonesia. 'ADALAH, 2(6).
<https://doi.org/10.15408/adalah.v2i6.8223>
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*, 3(2), 197–210.
<https://doi.org/10.36787/jsi.v3i2.354>
- Ngozwana, N. A. (2017). Civic education in Lesotho: implications for teaching of democratic citizenship. *International Journal of Lifelong Education*, 36(5), 526–540.
<https://doi.org/10.1080/02601370.2017.1304460>
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407>
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2), 144–166.
<https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.1977>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kontestasi Politik. *Academy of Education Journal*, 12(1), 39–47.
<https://doi.org/10.47200/aoej.v12i1.423>
- Okayanti, N. K., Arifin, I., & Putra, Y. D. (2023). Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di TK Bali Public School Denpasar Bali. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(3), 101–109.
<https://doi.org/10.53621/jider.v3i3.234>
- Parinduri, R. A. (2019). Does Education Increase Political Participation? Evidence from Indonesia. *Education Economics*, 27(6), 645–657.
<https://doi.org/10.1080/09645292.2019.1668914>
- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 5(1), 51.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v5i1.1125>
- Prasarti, S., & Prakoso, E. T. (2020). Karakter dan Perilaku Milineal: Peluang Atau Ancaman Bonus Demografi. *Consilia: Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, 3(1), 10–22.
<https://doi.org/10.33369/consilia.v3i1.11981>
- Rachmawati, N., Marini, A., Nafiah, M., & Nurasih, I. (2022). Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Impelementasi Kurikulum Prototipe di Sekolah Penggerak Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 3613–3625.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2714>
- Rahman, A. (2018a). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*,

- 10(1), 44–51.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>
- Rahman, A. (2018b). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44.
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8385>
- Rahmatiani, L. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa. Seminar Nasional Kewarganegaraan. 87-94. Diakses dari <http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/article/view/3665>
- Ramadhan, D. E., Saputra, A. D., & Hamid, S. A. H. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Partisipasi Politik Remaja. *Humaniorum*, 2(2), 1–7.
<https://doi.org/10.37010/hmr.v2i2.48>
- Ramdani, Z., Amrullah, S., & Tae, L. F. (2019). Pentingnya Kolaborasi dalam Menciptakan Sistem Pendidikan yang Berkualitas. *Mediapsi*, 5(1), 40–48.
<https://doi.org/10.21776/ub.mps.2019.005.01.4>
- Ribeiro, N., Malafaia, C., & Ferreira, T. (2023). Lowering The Voting Age To 16: Young People Making A Case for Political Education in Fostering Voting Competencies. *Education, Citizenship and Social Justice*, 18(3), 327–343.
<https://doi.org/10.1177/17461979221097072>
- Rizal, A. (2022). Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Indonesian Annual Conference Series*, 136–140. Retrieved from <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/844>
- Rohim, M., & Wardana, A., (2019). Analisis Politik Milenial: Persepsi Siswa SMA Terhadap Dinamika Politik Pada Pemilu 2019 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 47-63.
<https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.47-63>
- Sabiq, A. (2022). Peran Pesantren Dalam Membangun Moralitas Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, 3(1), 16–30.
<https://doi.org/10.53800/wawasan.v3i1.118>
- Sari, N.Z., Ismaya, E.A. & Ahsin, M.N. (2022). ‘Peran Orang Tua dalam Memotivasi Belajar Anak pada Pembelajaran Daring di Desa Gemiring Lor’, *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(2), 83–87.
[doi:10.24176/wasis.v3i2.7502](https://doi.org/10.24176/wasis.v3i2.7502)
- Sloam, J. (2018). #Votebecause: Youth Mobilisation for The Referendum on British Membership of The European Union. *New Media and Society*, 20(11), 4017–4034.
<https://doi.org/10.1177/1461444818766701>
- Soetrisnaadisendjaja, D., Juwandi, R., & Badrusalam, N. (2019). Hubungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai Pendidikan Demokrasi terhadap Partisipasi Siswa di Sekolah. *Untirta Civic Education Journal*, 4(1), 89–99. Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jhp/article/view/10425>
- Stefanelli, A., Meuleman, B., & Abts, K. (2023). The ontological core of political radicalism. Exploring the role of antagonist, dogmatic, and populist beliefs in structuring radical ideologies. *Contemporary Politics*, 1–23.
<https://doi.org/10.1080/13569775.2023.2269664>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, Y. & Handoyo, E. (2021). ‘Konsep Pendidikan Karakter Pada Kegiatan Sinu Bareng Komunitas Maiyah Galuh Kinasih Bumiayu’, *WASIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(2), pp. 88–95.
[doi:10.24176/wasis.v2i2.6283](https://doi.org/10.24176/wasis.v2i2.6283)
- Supriyanto, I. (2022). Pendidikan Karakter Kebangsaan Melalui Mata Pelajaran Pkn (Penelitian di SDS Muhammadiyah 2 Kabupaten Garut). *Primary Education Journals (Jurnal Ke-SD-An)*, 2(2), 78–90.
<https://doi.org/10.33379/primed.v2i2.1290>
- Susila, I., Dean, D., Yusof, R. N. R., Setyawan, A. A., & Wajidi, F. (2020). Symbolic Political Communication, and Trust: A Young Voters’ Perspective of the Indonesian Presidential Election. *Journal of Political Marketing*, 19(1–2), 153–175.
<https://doi.org/10.1080/15377857.2019.1652224>
- Tomporowski, P., Pendleton, D. M., & McCullick, B. A. (2017). Varieties of Learning and Developmental Theories of Memory: Neurophysiological Evidence and Its Relevance for Researchers and Educators. *Physical Activity and Educational Achievement: Insights from*

- Exercise Neuroscience* (pp. 32–62).
<https://doi.org/10.4324/9781315305790>
- Ulfah, N., Sumardiyani, L., Ardini, S. N., & Pramesti, M. R. D. (2023). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Dengan Tema Suara Demokrasi Di SMK Negeri 6 Semarang. *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 455–462.
<https://doi.org/10.55681/primer.v1i4.178>
- Utami, A. W., & Cramer, L. A. (2020). Political, Social, and Human Capital in The Face of Climate Change: Case of Rural Indonesia. *Community Development*, 51(5), 556–574.
<https://doi.org/10.1080/15575330.2020.1804956>
- Widhiasti, A., Putri, A., Fanani, M. A., Salim, N., & Kurnia, Y. R. (2022). Analysis of Learning Components in Implementation of Educational Process In Schools. *Curricula: Journal of Curriculum Development*, 1(2), 219–234.
<https://doi.org/10.17509/curricula.v1i2.52309>
- Zagidullin, M., Aziz, N., & Kozhakhmet, S. (2021). Government Policies and Attitudes To Social Media Use Among Users in Turkey: The Role Of Awareness Of Policies, Political Involvement, Online Trust, and Party Identification. *Technology in Society*, 67, 101708.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101708>